Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

MENGUNGKAP

BAGAIMANA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA MEMBELANJAKAN DANA ANGGARAN MEREKA UNTUK PENDIDIKAN

INDONESIA: KAJIAN BELANJA PUBLIK DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2020

IKHTISAR

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Australian Government

LAPORAN INI DISIAPKAN OLEH:
RYTHIA **AFKAR -** JAVIER **LUQUE -** SHINSAKU **NOMURA -** JEFFERY **MARSHALL**

Publikasi ini disusun oleh staf Bank Dunia dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia. Hasil temuan, interpretasi dan kesimpulan yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mewakili pandangan Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia maupun organisasi-organisasi yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin akurasi data yang tercantum dalam publikasi ini. Batas-batas, warna, denominasi, dan informasi lain yang ditampilkan pada peta mana pun di dalam publikasi ini tidak menyiratkan penilaian apa pun dari pihak Bank Dunia mengenai status hukum suatu wilayah, atau dukungan maupun penerimaan terhadap batasan tersebut.

Hak dan Izin

© 2020 Bank Dunia
1818 H Street NW, Washington DC 20433
Telepon: 202-473-1000; Internet: www.worldbank.org

Sebagian hak cipta dilidungi Undang-Undang

Materi dalam publikasi ini memiliki hak cipta. Karena Bank Dunia sangat mendukung penyebarluasan pengetahuan, publikasi ini boleh diproduksi ulang, secara keseluruhan atau sebagaian, untuk tujuan non-komersil selama mencantumkan secara lengkap atribusi untuk publikasi ini. Berbagai pertanyaan lainnya yang terkait dengan hak dan perizinan, termasuk hak tambahan, harap dialamatkan kepada Kantor Penerbit Bank Dunia (World Bank Publication), The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; faks: 202-522-2625; e-mail: pubrights@worldbank.org.

Atribusi

Harap mengutip publikasi ini sebagai berikut: Afkar, R; Luque, J; Nomura, S; Marshall, J 2020. Mengungkap Bagaimana Pemerintah Daerah di Indonesia Membelanjakan Dana Anggaran Mereka untuk Pendidikan, Bank Dunia. Jakarta. © Bank Dunia.

Informasi Kontak

Penulis dapat dihubungi di: rafkar@worldbank.org

Kredit Foto
Akhmad Dody/World Bank

DAFTAR ISI

Singkatan dan Akronim 2

Daftar Gambar 2

Kata Pengantar Oleh Satu Kahkonen
Country Director, Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste **3**

Ucapan Terima Kasih 5

1. **Ringkasan Eksekutif 6**
2. **Kesimpulan 14**

Daftar Pustaka 21

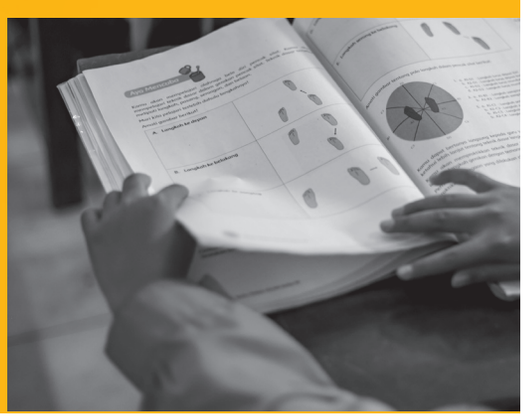

SINGKATAN dan AKRONIM

A.	**APM**	Angka Partisipasi Murni
B.	**BOS**	Bantuan Operasional Sekolah
	BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
C.	**CoA**	*Chart of Accounts*
D.	**DAK**	Dana Alokasi Khusus
	DAPODIK	Data administrasi dan hasil pendidikan
H.	**HCI**	*Human Capital Index*
I.	**IDR**	Indonesian Rupiah
	IINN	Integrity Index of the National Exam
K.	**Kemdikbud**	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
	Kemenag	Kementerian Agama
	Kemenkeu	Kementerian Keuangan
	KIAT Guru	Kinerja dan Akuntabilitas Guru
N.	**NTT**	Nusa Tenggara Timur
O.	**OECD**	Organisation for Economic Co-operation and Development
	OTSUS	Special Autonomy Fund (*Dana Otonomi Khusus*)
P.	**PAUD**	Pendidikan Anak Usia Dini
	PDB	Produk Domestik Bruto
	PER	*Public Expenditure Review*
	PNS	*Programme for International Student Assessment*
	PNS	Pegawai Negri Sipil
	PPAUD	Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini
R.	**Renstra**	Rencana Strategis
	RPJMN	Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah
S.	**SDI**	*Service Delivery Indicators*
	SIKD	Sistem Informasi Keuangan Daerah
	SNP	Standar Nasional Pendidikan
	SPM	Standar Pelayanan Minimum
T.	**TKG**	Tunjangan Khusus Guru
	TPG	Tunjangan Profesi Guru
U.	**UN**	*Ujian* Nasional

daftar GAMBAR

C.1 Teori kerangka perubahan: Alokasi anggaran pendidikan, anjuran sekolah dan hasil siswa **7**

KATA PENGANTAR

OLEH **SATU KAHKONEN,** *COUNTRY DIRECTOR*, BANK DUNIA UNTUK INDONESIA DAN TIMOR-LESTE

Sistem sekolah di Indonesia adalah yang keempat terbesar di dunia, dengan lebih dari 53 juta siswa dan 2,6 juta guru di lebih dari 250.000 sekolah. Selama 15 tahun terakhir, Indonesia telah melaksanakan banyak reformasi kebijakan demi meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk mandat secara konstitusional untuk membelanjakan 20 persen dari anggaran nasional untuk pendidikan, desentralisasi beberapa fungsi dalam sektor pendidikan kepada tingkat kabupaten/kota dan sekolah, dan mengatur tentang Guru serta Dosen dalam Undang-Undang No.14/2005 demi meningkatkan kualitas guru. Pada tahun 2018, pengeluaran untuk sektor pendidikan lebih besar daripada sektor lainnya.

Namun, karena anggaran nasional hanya 15 persen dari PDB Indonesia, maka belanja pendidikan ini hanya sekitar 3 persen dari PDB, termasuk yang terendah dibandingkan negara-negara lain di wilayah Asia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 menekankan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia dan memperkuat komitmen Indonesia untuk dapat membiayai pendidikan dasar tanpa biaya. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan yang mengesankan selama 15 tahun terakhir dalam memperluas akses untuk pendidikan, tetapi tantangan besar dalam implementasi tetap ada diantaranya: masih terdapat kesenjangan yang besar dalam tingkat partisipasi, pengeluaran bagi masing-masing siswa, hasil belajar siswa, kualitas guru, dan kapasitas manajemen di sekolah-sekolah yang terdapat di seluruh kabupaten / kota.

Meskipun peningkatan pendanaan telah memberikan kontribusi besar terhadap perluasan akses dalam pendidikan, hal itu belum memberikan perkembangan secara signifikan dalam hasil pembelajaran, yang diukur berdasarkan rendahnya nilai Ujian Nasional (UN) dan asesmen internasional (PISA), serta laporan kami tentang layanan pendidikan (SDI) di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa di Indonesia yang belum mencapai tingkat pengetahuan dan keterampilan minimum yang diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat secara maksimal. Sumber daya manusia — seperti halnya pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang diperoleh masing-masing individu sepanjang hidupnya — merupakan kunci kesuksesan Indonesia di masa depan. Namun, Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) memperkirakan bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan mencapai 54 persen dari level produktivitas optimal dibandingkan apabila mereka memperoleh pendidikan dan kesehatan yang prima dan menyeluruh. Hal Ini merupakan tantangan yang perlu diatasi oleh Indonesia demi mencapai visi Presiden Joko Widodo yaitu menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja keras, dinamis, terampil, serta menguasai sains dan teknologi.

Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung akan memberikan dampak besar pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengambil banyak langkah secara tepat waktu untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, tetapi pandemi masih cenderung mengurangi kesempatan belajar dan memperbesar ketidaksetaraan yang ada. Ruang fiskal diperkirakan akan diperketat pasca-COVID-19, sehingga semakin penting bagi Indonesia untuk memprioritaskan belanja sumber daya untuk pendidikan, demi memastikan bahwa semua anak masih memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas agar tercapainya potensi mereka secara penuh.

Melalui proses desentralisasi, peran pemerintah daerah merupakan peran terpenting dalam pelaksanaan anggaran dan hasil kualitas pendidikan akan meningkat, namun hanya sedikit informasi yang tersedia untuk dapat memahami bagaimana mereka melakukan perencanaan, alokasi, dan pelaksanaan anggaran pendidikan. Oleh karena itu laporan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan informasi tersebut dengan menilai kegiatan utama yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota, dengan melihat pendanaan kabupaten/kota, kapasitas, dan karakteristiknya dalam menghadapi tantangan mendasar terkait efektivitas belanja pendidikan.

Rekomendasi difokuskan pada kajian tentang program pendidikan daerah, standarisasi klasifikasi anggaran, peningkatan koordinasi dan pembentukan sistem pengelolaan data pendidikan yang terintegrasi demi meningkatkan akurasi data, akuntabilitas dan pembuatan kebijakan berbasis bukti atau hasil.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana Indonesia membelanjakan sumber dayanya untuk pendidikan, dan bagaimana membelanjakannya dengan lebih baik demi mencapai tujuan pendidikan di Indonesia, untuk mencapai potensi optimal dan menjadi lebih tangguh di dunia yang berubah dengan cepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dibuat oleh **Rythia Afkar**, **Javier Luque**, **Shinsaku Nomura**, dan **Jeffery Marshall**, di bawah bimbingan dari **Satu Kristiina Kahkonen** (*Country Director*, Indonesia dan Timor-Leste). Pengumpulan data belanja pendidikan di kabupaten/kota dikelola oleh **Muhammad Farman Izhar**, **Teguh Murdjijanto**, **Ahmad Riyadi**, dan **Irianto**, sedangkan penggunaan Bagan Akun Standar di tingkat daerah dilakukan oleh **Blane Lewis** dan **Muhammad Farman Izhar**. Dengan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada **Noah Yarrow** dan **Toby Linden** atas bimbingan dan masukannya yang bermanfaat, **Citra Kumala** dan **Alexander Michael Tjahjadi** atas bantuannya selama penelitian yang luar biasa, dan **Eddy Quach Trang** atas masukan dan sarannya yang sangat membantu. Kami berterima kasih atas dukungan dari Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melaksanakan pekerjaan ini. Laporan ini mendapat masukan-masukan yang berguna dari para peer reviewer seperti: **Dina Abu-Ghaida** (Ekonom Utama), **Dewi Susanti** (Senior Spesialis Pembangunan Sosial), dan **Pedro Cedran Infantes** (Ekonom Senior).

Kami juga berterima kasih kepada **Peter Kjaer Milne** yang telah mengedit laporan ini dan Box Office yang telah merancang dan menyusun laporan ini, yang dipandu oleh **Maureen Rustandi**. **Deepali Gupta** mengerjakan finalisasi laporan dan komunikasi. **Lestari Boediono**, **GB Surya**, **Jerry Kurniawan**, dan **Maulyati Nuraini** memberikan dukungan melalui website dan saat acara peluncuran laporan ini.

Pendanaan untuk laporan ini disediakan oleh Pemerintah Australia (melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan).

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

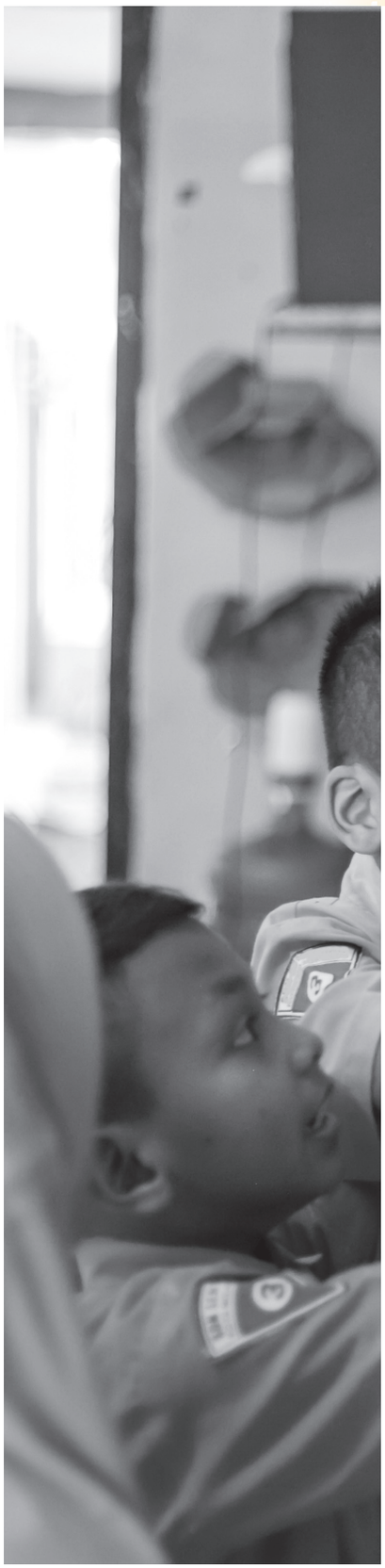

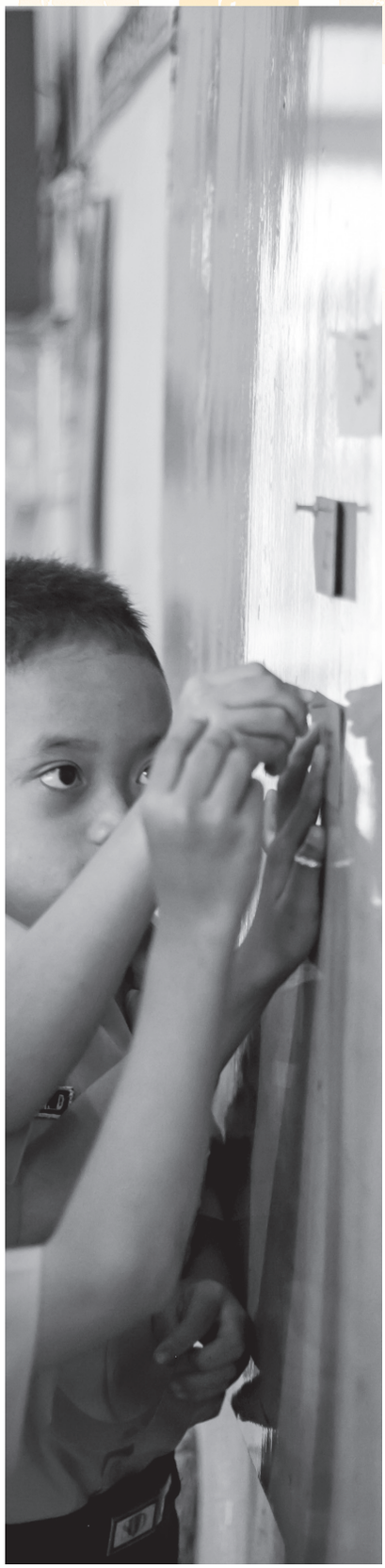

Amandemen Konstitusi 2002, Pemerintah Indonesia kini telah memenuhi mandatnya untuk **mengalokasikan 20% anggaran nasional untuk sektor pendidikan**. Persentase ini dua kali lebih besar dari beberapa negara Asia Timur.

Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020–2024 (RPJMN) terbaru, Indonesia telah menetapkan prioritas tertinggi dalam lima tahun mendatang pada pengembangan sumber daya manusia. Hal ini mencerminkan kenyataan yang malang bahwa perkembangan sumber daya manusia di Indonesia belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, mengingat generasi penerus tenaga kerja Indonesia hanya akan mencapai 54 persen dari level produktivitas yang seharusnya dibandingkan apabila mereka menempuh 14 tahun pendidikan yang berkualitas dan memiliki kesehatan yang prima.[1]

Penguatan di sektor pendidikan Indonesia sangatlah penting untuk mencapai tujuan RPJMN. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan serangkaian reformasi kebijakan yang penting di bidang pendidikan selama dua dekade terakhir, termasuk Amandemen Konstitusi tahun 2002 yang mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan belanja pendidikan dengan mengalokasikan 20 persen anggaran nasional pada sektor tersebut. Namun terlepas dari langkah penting ini, implementasi kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan untuk mencapai peningkatan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dialokasikan sesuai yang diharapkan. Sedangkan Amandemen terbaru pemerintah Indonesia atas undang-undang desentralisasi, Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, mengalihkan peran yang jauh lebih besar dalam pengelolaan pendidikan dan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah. Namun, hanya sedikit informasi yang tersedia tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan perencanaan, alokasi, dan pelaksanaan anggaran pendidikan mereka — yang merupakan pendorong utama peningkatan pengembangan sumber daya manusia.

Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan informasi yang penting dengan menilai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam memenuhi mandatnya di sektor pendidikan. Laporan ini memberikan sorotan tentang "Mengungkap Bagaimana Pemerintah Daerah di Indonesia Membelanjakan Dana anggarannya untuk Pendidikan" dalam Bahasa Indonesia. Untuk laporan lengkapnya, silakan lihat: LINK. Data yang dikumpulkan dari Januari hingga Juni 2019 dalam survei terhadap 27 kabupaten dan kota yang tersebar di delapan provinsi, serta analisis data belanja nasional, menghasilkan lima kesimpulan utama:

[1] Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*): https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital

Catatan**Penting**1:

Peningkatan alokasi anggaran pendidikan telah berkontribusi besar pada peningkatan akses pendidikan, tetapi hal tersebut hanya memberikan kontribusi kecil dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Setelah Amandemen Konstitusi 2002, Pemerintah Indonesia kini telah memenuhi mandatnya untuk mengalokasikan 20 persen anggaran nasional untuk sektor pendidikan. Persentase ini dua kali lebih besar dari beberapa negara Asia Timur, seperti Jepang (9,3 persen) dan Republik Korea (12,8 persen), sedangkan setara dengan Malaysia (21 persen) dan Singapura (17,7 persen), meskipun kedua negara tersebut memiliki proporsi belanja pendidikan terhadap PDB yang jauh lebih besar (Bank Dunia 2020a). Sebagai dampak dari langkah besar ini, sumber daya keuangan yang saat ini tersedia dan dialokasikan untuk sektor pendidikan di Indonesia telah meningkat lebih dari 200 persen antara tahun 2002 dan 2018 (dalam nilai riil). Pada tahun fiskal 2020, anggaran pendidikan mencapai Rp508 triliun (US $ 34,5 miliar) untuk jenjang pendidikan dini hingga kelas 12, pendidikan tinggi (tersier), dan pelatihan kejuruan.

Peningkatan sumber daya keuangan ini berkontribusi besar pada peningkatan akses pendidikan. Dimana selama periode 2003–2019, tingkat partisipasi sekolah menengah meningkat dari sejumlah 12,9 juta menjadi 18,7 juta siswa, dan meningkatkan angka partisipasi murni (APM) dari 63 menjadi 79 persen, dan dari 40 menjadi 61 persen, masing-masing untuk sekolah menengah pertama dan atas.

Terlepas dari peningkatan yang mengesankan dalam pendaftaran siswa dan akses pendidikan, kemajuan hasil belajar siswa masih gagal memenuhi harapan. Pada sebuah penilaian internasional yaitu, tes Program Penilaian Pelajar Internasional (*Programme for International Student Assessment* (PISA)), yang dilakukan pada tahun 2018, menunjukkan bahwa hanya sekitar sepertiga siswa di Indonesia yang mencapai tingkat minimal kemahiran dalam membaca, matematika, dan sains, yaitu level 2 atau lebih (30 persen dalam membaca, 28 persen dalam matematika, dan 40 persen dalam sains). Antara tahun 2003 dan 2018, prestasi siswa Indonesia dalam matematika meningkat sebesar 19 poin persentase, sementara itu penurunan dalam membaca sebesar 11 poin persentase. Hasil dalam bidang sains relatif stabil, dengan peningkatan 1 poin persentase. Hasil Ujian Nasional (UN) juga menunjukkan kinerja yang rendah, dimana nilai rata-rata untuk seluruh mata pelajaran dan tipe sekolah pada ujian nasional akhir sekolah menengah adalah 49,5 poin dari 100 pada tahun 2018, sementara standar kelulusan minimum adalah 55 poin. Target pendidikan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015–19 (RPJMN 2015–2019) dan Rencana Strategis (Renstra), dimana didalamnya termasuk partisipasi pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PPAUD), partisipasi sekolah menengah, persentase sekolah dengan akreditasi minimal B, dan penurunan angka putus sekolah, belum juga tercapai meskipun alokasi anggaran dipastikan sesuai amanat 20 persen.

Perlu dicatat bahwa meskipun Indonesia membelanjakan sebagian besar anggaran nasionalnya untuk pendidikan, jumlah ini relatif rendah sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang hanya sebesar 3 persen, karena keseluruhan anggaran nasional juga relatif rendah. Dalam proporsinya terhadap PDB, tingkat ini sekitar setengah dari tingkat pengeluaran Malaysia (6,1 persen) dan Vietnam (6,3 persen) (Bank Dunia 2020). Lebih lanjut, bukti dari penilaian PISA menunjukkan bahwa Indonesia tidak diragukan lagi perlu mengeluarkan lebih banyak dana untuk setiap siswa kedepannya jika ingin menyamai kinerja negara tetangganya dalam hasil belajar siswa.

Catatan**Penting**2:

Ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap mandat alokasi anggaran 20 persen dan alokasi yang tidak memadai untuk belanja non-gaji dapat menghambat kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil pembelajaran siswa.

Pemerintah daerah mempunyai mandat untuk membelanjakan porsi terbesar dari anggaran pendidikan. Dari total Rp 508 triliun untuk sektor pendidikan, Rp 319 triliun (US $ 21,7 miliar) dialokasikan untuk "pendidikan umum"[2] di mana Rp 306 triliun (US $ 20,8 miliar) dialokasikan untuk mendanai pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menghabiskan 60 persen dari total anggaran pendidikan. Namun, studi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018, 112 dari 508 kabupaten/kota (sedikit di atas 22 persen) tidak memenuhi amanat 20 persen untuk belanja pendidikan. Kapasitas perencanaan dan pelaksanaan yang rendah, dan kurangnya pemantauan secara sistematis berkontribusi pada situasi ini.

Belanja pendidikan di tingkat daerah didominasi oleh belanja terkait gaji dan menyisakan sumber daya yang terbatas untuk belanja non-gaji. Dimana rata-rata pemerintah daerah menghabiskan 75 persen dari total anggaran pendidikan mereka untuk gaji, sedangkan dalam contoh kasus ekstrim, 32 kabupaten/kota menghabiskan lebih dari 90 persen anggaran mereka untuk gaji. Lebih lanjut, analisis dari kabupaten/kota yang terpilih menunjukkan bahwa kategori belanja non-gaji juga memasukkan komponen gaji untuk guru non-PNS, yang selanjutnya mengurangi sumber daya aktual yang tersedia untuk belanja non-gaji. Dari studi kasus kepada kabupaten/kota terpilih menunjukkan bahwa belanja non-gaji aktual atau de facto hanya mencapai sekitar 14 persen dari total anggaran pendidikan. Anggaran belanja non gaji dimaksudkan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan, seperti beasiswa, bantuan tambahan untuk sekolah, pelatihan guru, dan biaya operasional lainnya, yang penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, banyak kabupaten/kota yang tidak memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan program tersebut karena besarnya biaya tetap untuk gaji. Analisis menunjukkan bahwa jika dihitung jumlah anggaran per siswa, rata-rata alokasi anggaran pendidikan kabupaten/kota untuk kategori non-gaji hanya Rp 2 juta (US $ 133) per siswa per tahun.

[2] Pendanaan untuk "pendidikan umum" mencakup pendidikan pra-pendidikan tinggi di bawah sistem Kemdikbud (Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, Sekolah Dasar / SD, Sekolah Menengah Pertama / SMP, Sekolah Menengah Atas / SMA, dan Sekolah Menengah Kejuruan/SMK).

Catatan**Penting**3:

Pemerintah daerah masih menggunakan sistem anggaran berbasis input daripada mengalokasikan sumber daya demi peningkatan pembelajaran siswa. Mereka menghadapi kendala kapasitas dalam penganggaran dan perencanaan, serta pelaksanaan anggaran.

Praktik perencanaan dan penganggaran saat ini sebagian besar didasarkan pada struktur sistem pendidikan berbasis input (jumlah guru, kondisi/infrastruktur sekolah, dll.), daripada berfokus pada hasil usaha kinerja sekolah atau hasil belajar siswa. Indikator keberhasilan yang saat ini digunakan sebagian besar berkaitan dengan akses ke pendidikan (misalnya tingkat partisipasi danangka putus sekolah) daripada indikator kualitas pendidikan (misalnya kinerja sekolah atau hasil belajar siswa). Mengingat pemerintah daerah kembali mengalokasikan sumber dayanya tanpa perencanaan strategis, pola pengeluaran tersebut semakin memperkuat status-quo pada tingkat pembelajaran siswa yang rendah.

Terdapat kesenjangan besar antara prioritas Pemerintah Indonesia dengan pengeluaran pemerintah daerah. Sebagai contoh kabupaten/kota membelanjakan sangat sedikit untuk pendidikan dan pengembangan anak usia dini (PPAUD), rata-rata hanya 2,6 persen dari anggaran pendidikan mereka. Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal PAUD dimasukkan sebagai salah satu pelayanan publik dasar yang dikelola oleh kabupaten/kota dan harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan minimal warga negara Indonesia.[3] Dalam beberapa kasus, analisis mengidentifikasi adanya masalah kelebihan beban bagi kabupaten/kota yang turut berperan dalam madrasah dan pendidikan tinggi, dimana kedua hal tersebut berada di luar mandat yang ditetapkan. Daripada mengerjakan banyak program dan kegiatan yang berbeda di tingkat daerah, prioritas sebaiknya tetap dilakukan dengan tujuan mengkonsolidasikan pengeluaran untuk beberapa program dan kegiatan yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Mengingat batasan kapasitas yang dimiliki, hampir 30 persen kabupaten/kota tidak berhasil membelanjakan semua alokasi yang dianggarkan untuk pendidikan pada tahun tertentu. Hal ini lebih banyak terjadi di kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua. Untuk mengatasai permasalahan ini dibutuhkan peningkatan kapasitas yang lebih terfokus dan bantuan teknis tambahan pada perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk kabupaten/kota yang berkinerja rendah. Pembelajaran dari sesama (*peer-to-peer learning*) dengan memasangkan kabupaten/kota yang berkinerja tinggi dan rendah juga bisa menjadi salah satu opsi solusi.

Catatan**Penting**4:

Kurangnya pelaporan dan pemantauan yang tersistematis terhadap pengeluaran pendidikan pemerintah daerah dapat melemahkan penegakan prioritas nasional dan mengganggu implementasi penyusunan kebijakan berbasis bukti/hasil.

[3] Peraturan Pemerintah No. 2/2018.

Sistem penganggaran yang ada saat ini tidak dapat menghasilkan informasi mengenai anggaran dasar dan informasi pengeluaran untuk pemerintah daerah di bidang pendidikan, yang mana merupakan hal yang sangat penting untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti/hasil. Hambatan utama yang dimiliki adalah: (i) kategori pengeluaran yang non-standar; dan (ii) penggunaan berbagai platform teknologi informasi yang tidak saling kompatibel. Meskipun terdapat beberapa kategori pengeluaran/garis definisi yang sama antara pemerintah daerah, kabupaten dan kota tetap saja masih memiliki banyak kategori pengeluaran yang berbeda dalam catatannya. Hal ini berarti bahwa faktor tersebut tidak dapat dibandingkan, atau bahkan dipahami, oleh seseorang yang belum terbiasa dengan sistem penganggaran daerah tersebut. Sedangkan secara lintas kabupaten dan kota terdapat berbagai aplikasi atau platform untuk perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, pelaporan, serta pengelolaan aset dan inventaris yang berbeda-beda.

Demi tercapainya tujuan ini, diperlukan tinjauan ulang terhadap klasifikasi anggaran yang sudah distandardisasi (Bagan Akun Standar) untuk memastikan bahwa klasifikasi tersebut memenuhi kebutuhan, dan mendukung pengambilan keputusan, baik oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Teknologi big data juga dapat diperkenalkan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengintegrasikan, dan menganalisis sejumlah besar informasi pada data keuangan pendidikan, serta data administrasi dan hasil pendidikan, jika data-data ini disimpan dengan menggunakan standarisasi Bagan Akun Standar. Data pengeluaran kemudian dapat dikumpulkan dengan lebih efektif dan digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk perencanaan strategis dan alokasi anggaran di masa mendatang.

Catatan**Penting**5:

Di tingkat pemerintah kabupaten/kota, hanya ada sedikit korelasi antara pengeluaran untuk program tertentu dan hasil yang diharapkan. Menggunakan informasi tentang hasil belajar dan kinerja siswa dapat membantu memobilisasi dukungan publik untuk memperkuat akuntabilitas.

Skema utama transfer pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesi guru (TPG), dan dana alokasi khusus untuk rehabilitasi (DAK fisik), memiliki korelasi yang rendah dengan keluaran dan hasilnya. Misalnya, program sertifikasi guru di bawah TPG dipandang tidak berdampak signifikan terhadap hasil belajar siswa (de Ree et al. 2017). Sumber daya yang dialokasikan melalui DAK fisik hanya memberikan korelasi yang rendah terhadap jumlah ruang kelas yang rusak, terutama untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Penggunaan dana BOS juga tidak terkait erat dengan peningkatan nyata dalam hasil pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kuantitas atau jumlah tertentu dari investasi pendidikan merupakan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pembelajaran, hal ini bukanlah belum cukup jika dilaksanakan tanpa alokasi strategis atau mekanisme akuntabilitas yang tepat. Di saat yang sama, melibatkan masyarakat, orang tua, dan pelaku sekolah untuk melakukan pengawasan dan akuntabilitas di tingkat lokal terhadap layanan pendidikan telah terbukti meningkatkan hasil.

Evaluasi dampak dari program KIAT Guru — program percontohan gaji guru berbasis kinerja yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas guru —menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar siswa. Dalam program ini, proporsi gaji guru terkait dengan kinerja siswa, dan hasilnya menunjukkan bahwa nilai bahasa siswa meningkat dari 37,5 menjadi 50 persen, dan nilai matematika dari 37,4 menjadi 48,8 persen (Gaduh et al. 2020). Bukti ini menunjukkan bahwa jika diterapkan dengan benar dalam skala besar, menggabungkan partisipasi masyarakat dan pembiayaan berbasis kinerja dapat menjadi efektif dalam memperkuat akuntabilitas dan mendorong kinerja berbasis bukti dan berorientasi hasil di semua tingkat administrasi pendidikan dan pelaksananya, termasuk kabupaten/kota, sekolah, dan guru.

2. KESIMPULAN

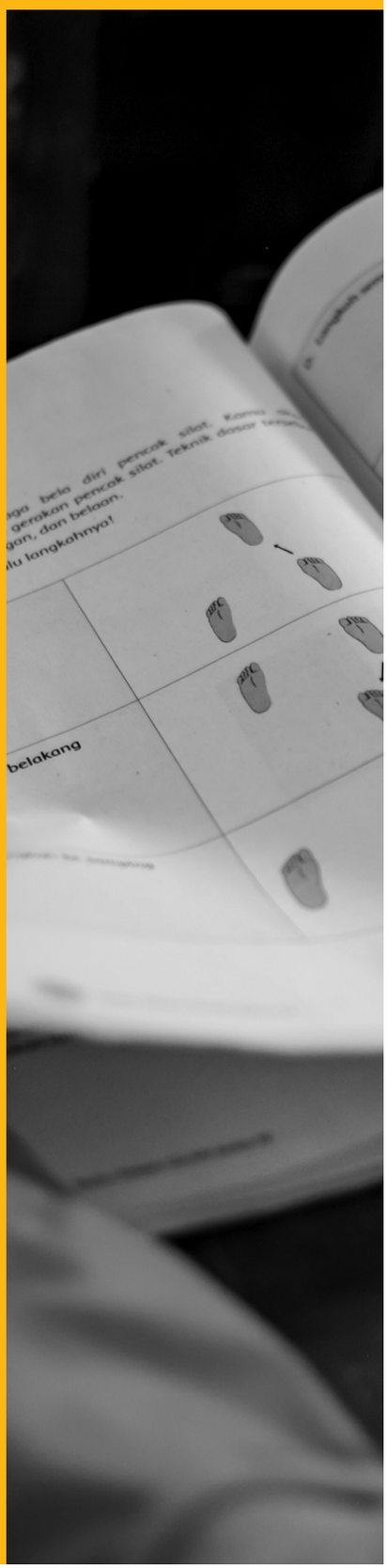
belakang

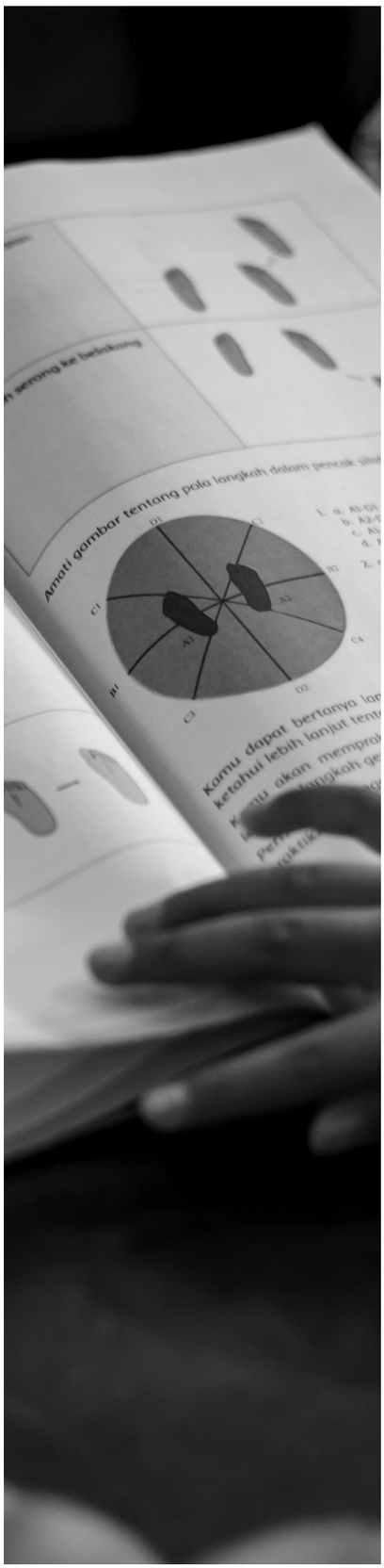
Amati gambar tentang pola langkah dalam pencak silat

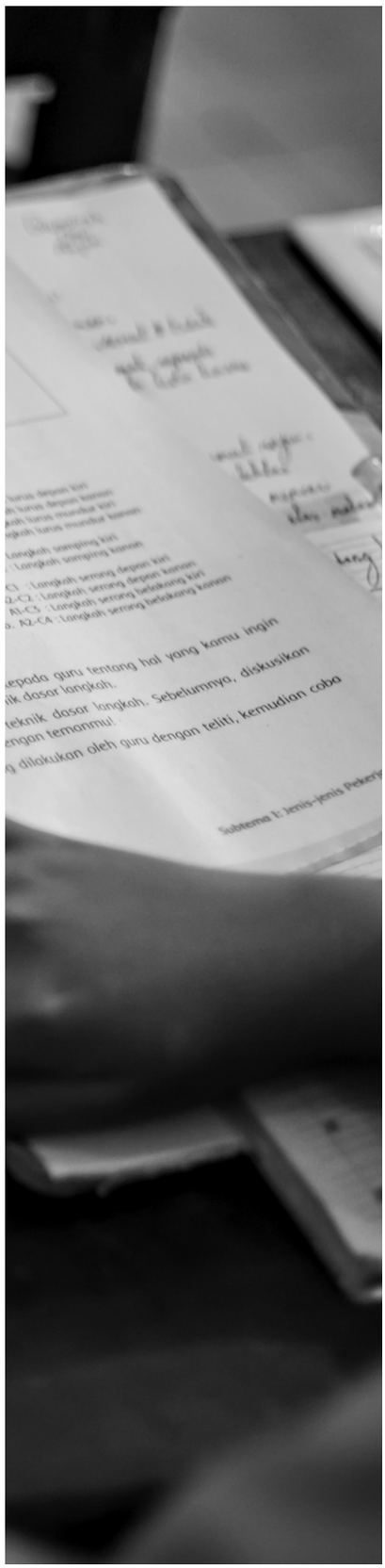

Meskipun Indonesia telah membuat **kemajuan yang mengesankan selama 15 tahun terakhir dalam memperluas akses pendidikan**, tetapi tantangan besar tetap ada. Kesenjangan masih terjadi dalam tingkat partisipasi murni dan kasar.

Struktur laporan tinjauan terhadap Belanja Publik Pemerintah Daerah di bidang Pendidikan di seluruh Indonesia didasarkan pada analisis dalam kerangka yang digambarkan pada Gambar C.1. Setelah pendahuluan di Bab 1, analisa melihat tingkat variasi, divergensi, dan ketimpangan antarkabupaten/kota, di Bab 2, analisa kemudian dilanjutkan dengan ringkasan penetapan anggaran pendidikan secara keseluruhan, dengan fokus pada mekanisme transfer dari pusat ke pemerintah daerah dalam Bab 3. Bab 4 kemudian lebih terfokus pada bagaimana kabupaten/kota menggunakan sumber daya pendidikan mereka, yang dibangun dari sumber data kuantitatif dan kualitatif. Bab 5 menyatukan bagian-bagian yang berbeda dengan memeriksa hubungan antara pengeluaran pendidikan, kondisi sekolah seperti ukuran kelas dan infrastruktur, dan hasil pendidikan (tingkat pendaftaran, hasil belajar siswa, dll.). Bab 6 diakhiri dengan ringkasan dan rekomendasi secara lebih luas. Silakan lihat laporan lengkap untuk rincian lebih lanjut tentang masing-masing topik ini. Bab penutup ini memberikan catatan dan rekomendasi utama untuk menilai kembali kapasitas keuangan kabupaten, mengkonsolidasikan dan memprioritaskan program pendidikan agar lebih efektif, menyederhanakan dan menstandarkan klasifikasi anggaran, dan memanfaatkan teknologi untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti yang lebih baik.

GAMBAR C.1

Teori kerangka perubahan: Alokasi anggaran pendidikan, anjuran sekolah dan hasil siswa

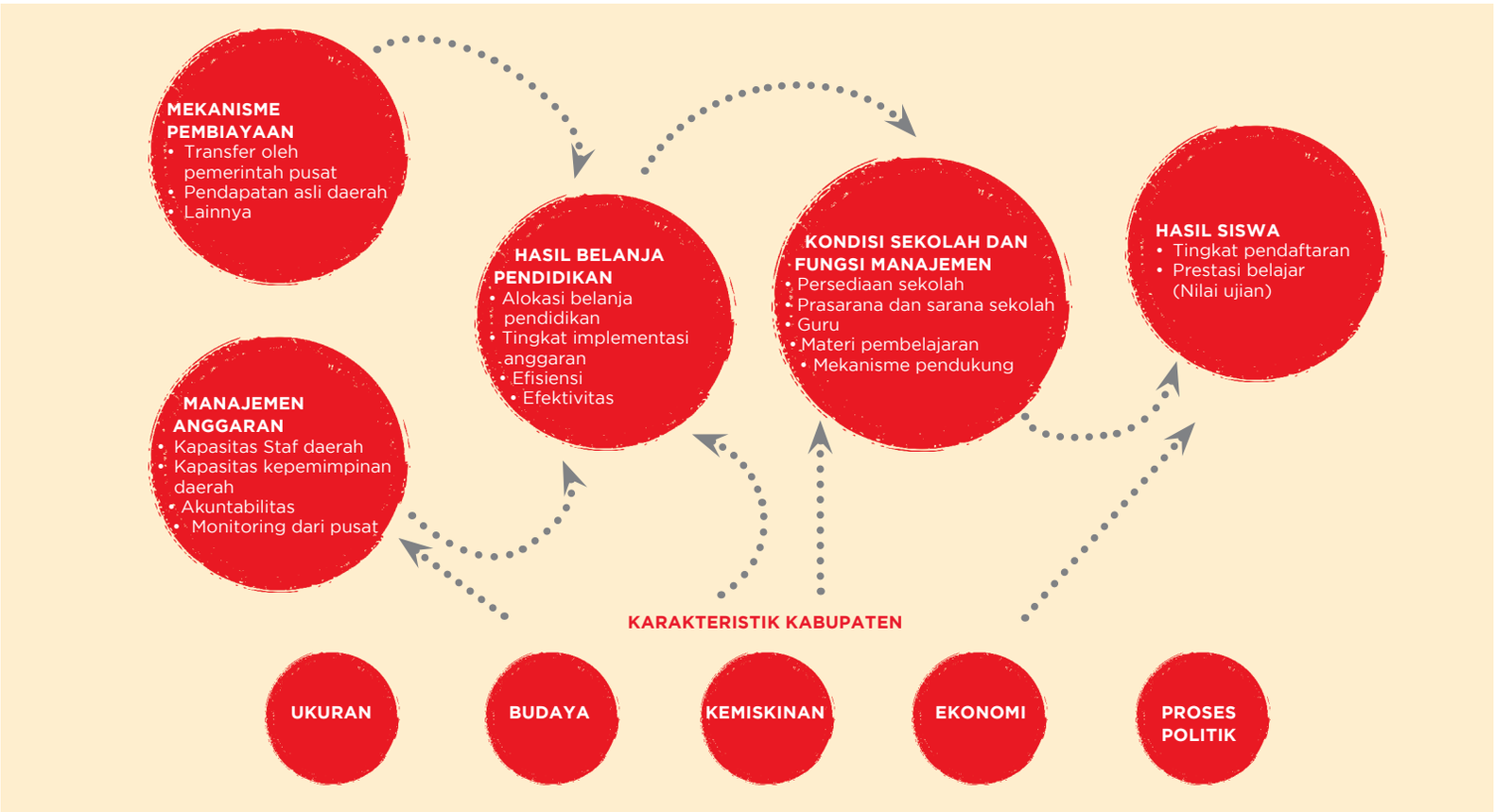

Sumber daya manusia merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi melalui warga negara yang tangguh, sehat, dan terserap di dunia kerja, baik dalam jangka panjang maupun dalam waktu dekat untuk mendukung pemulihan dari kondisi pandemi COVID-19. Menurut Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index* (HCI)), calon tenaga kerja Indonesia hanya mencapai 54 persen dari tangkat produktivitas optimal seandainya mereka memperolah 14 tahun pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang prima. Hal ini akan memberikan tantangan bagi Indonesia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan tenaga kerja yang mampu bekerja keras, dinamis, dan terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Laporan Belanja Publik Pendidikan Daerah dan laporan pelengkapnya yakni, Mengukur Kualitas Layanan Pendidikan menurut Kemenag **(Yarrow et. al, 2020), adalah studi terbaru dalam penelitian panjang terhadap sektor pendidikan di Indonesia,** didukung oleh Bank Dunia dan mitranya untuk membantu mengukur kemajuan dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membuat analisis dari kedua laporan ini tersedia bagi para pembuat kebijakan untuk lebih memahami apa yang dibayar oleh Indonesia dalam pendidikan (PER Pendidikan Daerah), dan apa yang diperoleh dalam bentuk hasil belajar siswa (survei SDI). Berbekal pengetahuan ini, pembuat kebijakan dapat mengukur perbaikan dalam sistem pendidikan dan mengimplementasikan

perubahan untuk dapat mencapai tujuan jangka panjang demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan yang mengesankan selama 15 tahun terakhir dalam memperluas akses pendidikan, tetapi tantangan besar tetap ada. Kesenjangan masih terjadi dalam tingkat partisipasi murni dan kasar, terutama di pendidikan menengah atas dan pendidikan anak usia dini. Rata-rata secara nasional dalam berbagai metrik, khususnya dua hal diatas, menutupi kesenjangan besar yang terjadi maka di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Terdapat juga kesenjangan yang besar dalam pengeluaran per siswa, kualitas guru, prestasi siswa, dan kapasitas manajemen di sekolah dan antar kabupaten/kota, seperti yang diungkapkan oleh kajian belanja pendidikan publik daerah dan SDI.

Kemajuan pembelajaran siswa mengecewakan, berdasarkan rendahnya rendahnya nilai ujian nasional (UN) dan penilaian internasional (PISA), yang menunjukkan bahwa banyak siswa Indonesia yang tidak mencapai tingkat pengetahuan dan keterampilan minimum untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Ada juga ketimpangan yang tinggi antar kabupaten/kota dalam hal prestasi siswa. Ketimpangan antar kabupaten/kota terjadi secara konsisten dan mendalam: kabupaten/kota dengan APM dan hasil nilai UN terendah pada tahun 2015 juga termasuk yang memiliki kinerja paling rendah pada tahun 2018, meskipun konsistensi lebih terlihat dalam ukuran partisipasi daripada nilai ujian. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah dan kabupaten/kota yang berkinerja buruk tetap terjebak dalam lingkaran kinerja yang buruk.

Banyaknya dana yang dikeluarkan tidak selalu mengarah pada hasil pendidikan yang lebih baik. Meskipun ada peningkatan besar dalam pendanaan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir tetapi terdapat beberapa kendala seperti yang disoroti dalam analisa belanja publik untuk pendidikan di tingkat daerah ini, pengetahuan guru dalam bidang mata ajarnya dan kemampuan pedagogis yang buruk, manajemen sekolah yang lemah dan penggunaan dana yang tidak efektif, menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun mengeluarkan lebih banyak, tidak mendapatkan "hasil terbaik untuk uangnya" dalam hal pengeluaran (Bank Dunia 2020a).

Pengeluaran yang lebih baik melalui pemahaman bagaimana pengeluaran tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa (atau tidak, tergantung kasusnya) adalah sangat penting. Sumber daya yang tersedia untuk kabupaten/kota didasarkan pada transfer, pendapatan asli daerah, dan pilihan anggaran (yaitu, bagaimana kabupaten/kota mengalokasikan belanjanya untuk berbagai fungsi). Kabupaten/kota yang lebih kecil dalam hal jumlah penduduk menerima jumlah transfer per siswa yang lebih tinggi dan terdapat bukti bahwa kabupaten/kota yang lebih besar mengkompensasi jumlah transfer pemerintah pusat yang lebih rendah dengan meningkatkan porsi anggaran yang mereka alokasikan untuk pendidikan. Akibat perbedaan pilihan jumlah transfer dan pilhan anggaran, terdapat perbedaan yang sangat besar antara kabupaten/kota dalam hal jumlah belanja pendidikan per siswa.

Untuk memastikan bahwa semua kabupaten/kota memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, perlu dilakukan tinjauan atas kemampuan keuangan dan teknis daerah. Beberapa kabupaten/kota ternyata memiliki sumber daya yang sangat terbatas untuk melaksanakan program pendidikan (selain belanja gaji). Namun, mereka menunjukkan kreativitas yang tinggi dalam menggunakan sumber daya yang mereka miliki, dan cenderung melampaui mandat yang disyaratkan oleh undang-undang desentralisasi. Dengan sumber daya yang terbatas ini, kabupaten/kota melaksanakan banyak program/inisiatif kebijakan pendidikan. Oleh karena itu Kemdikbud harus memberikan panduan yang lebih baik kepada pemerintah daerah tentang hal apa yang dapat berhasil untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Ketika pengeluaran keuangan daerah menjadi lebih transparan, dampak dari apa yang dilakukan kabupaten/kota harus dievaluasi dan dipantau. Belanja untuk pendidikan anak usia

dini masih tertinggal dan perlu lebih diprioritaskan oleh kabupaten/kota. Bukti bahwa manfaat tertinggi terdapat pada investasi di tahun-tahun awal perlu lebih ditekankan dan kabupaten/kota perlu diberi insentif untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pendidikan anak usia dini. Pemerintah kabupaten/kota juga menghadapi tantangan kapasitas dalam penganggaran, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran pendidikan. Kemenkeu dan Kemdikbud harus mengidentifikasi kabupaten/kota dengan kapasitas rendah dalam perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran. Kemenkeu dan Kemdikbud juga harus menyediakan kegiatan pengembangan kapasitas dan bantuan teknis yang disesuaikan dengan kabupaten/kota yang tercantum dalam perencanaan & pelaksanaan program pendidikannya.

Prioritas program pendidikan di daerah harus dilakukan dengan mengkonsolidasikan pengeluaran pada sejumlah kecil program yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemdikbud dan pemerintah daerah harus berkoordinasi dalam menyelaraskan inisiatif kebijakan pendidikan nasional. Misalnya, mereka harus fokus pada peningkatan koordinasi dan keselarasan antara BOS nasional dan BOSDA daerah agar dapat memaksimalkan sinergi antar sumber pendanaan dan mempercepat pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) dan standar nasional Pendidikan (SNP). Beberapa kabupaten/kota diketahui melaksanakan program daerah serupa dengan BOS. Jika pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi, efisiensi program BOS dapat ditingkatkan melalui perencanaan bersama antara program BOS daerah dan program BOS nasional.

Untuk mengurangi beban anggaran pembayaran gaji dan demi menciptakan lebih banyak ruang fiskal, kabupaten/kota perlu mengelola rasio siswa-guru dan ukuran kelas agar lebih baik. Sumber daya kabupaten/kota untuk pendidikan terkait erat dengan jumlah guru PNS dan pembayaran gajinya, serta pembayaran tunjangan TPG dan TKG. Perbedaan besar jumlah guru PNS per siswa antar kabupaten/kota menyebabkan ketimpangan sumber daya yang dialokasikan per siswa. Mayoritas guru PNS ini telah dipekerjakan lebih dari satu dekade yang lalu dan sekarang mendekati masa pensiun. Situasi ini merupakan kesempatan Kemendikbud untuk meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan kualitas guru, dengan hanya mempekerjakan guru yang berkualitas terbaik.

Klasifikasi anggaran yang telah ditingkatkan dan distandarisasi (Bagan Akun Standar) harus ditinjau kembali untuk memastikan ketersediaan dan kualitas informasi yang diperlukan tentang pengeluaran anggaran untuk kabupaten/kota dan provinsi. Pengumpulan dan analisis data yang lebih baik di tingkat kabupaten/kota merupakan hal yang sangat penting untuk menilai efisiensi dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Memproses data belanja pendidikan kabupaten/kota secara rinci memang penuh dengan tantangan. Laporan keuangan kabupaten/kota seringkali terdiri dari ratusan halaman atau terdiri dari ratusan baris kegiatan yang berbeda. Variasi yang tinggi dalam bagaimana kabupaten/kota melaporkan atau mengklasifikasikan pengeluaran pendidikan mereka semakin memperumit masalah ini. Kemenkeu dan Kemendagri perlu bekerja sama dengan Kemendikbud dan pemerintah daerah untuk mengembangkan klasifikasi program dan kegiatan pendidikan yang lebih sederhana yang akan menghasilkan data dan statistik yang lebih baik, menjaga komparabilitas dan konsistensi dalam alokasi biaya antar pemerintah daerah dari waktu ke waktu, dan membantu baik pusat maupun pemerintah daerah melacak kemajuan dan memastikan bahwa keputusan mereka berdasarkan bukti. Kemendagri dan Kemendikbud juga harus memberikan pelatihan CoA dan menyediakan *helpdesk* untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pelaporan mereka berdasarkan Bagan Akun Standar baru yang telah ditingkatkan dan distandarisasi.

2. Kesimpulan

Teknologi *big data* dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengintegrasikan, dan menganalisis sejumlah besar informasi pada data keuangan pendidikan, dan data administrasi dan hasil pendidikan. Saat ini, data keuangan pendidikan (SIKD dan laporan keuangan kabupaten) dikelola oleh Kemenkeu dan pemerintah daerah, sedangkan data administrasi dan hasil pendidikan (Dapodik) dikelola oleh Kemdikbud. Kedua sistem data utama ini harus diintegrasikan untuk dapat membantu Pemerintah menilai efektivitas dan efisiensi belanja pendidikan. Misalnya, pola belanja kabupaten/kota dan sekolah dapat secara otomatis dianalisis untuk menginformasikan pembuat kebijakan agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal alokasi anggaran, harmonisasi program pendidikan nasional dan daerah (BOS, BOSDA, gaji guru non-sipil, dll.), memberikan insentif kepada kabupaten/kota dan sekolah (misalnya, melalui hibah sekolah berbasis kinerja), dan guru yang melakukan kinerja baik (misalnya, melalui tunjangan guru berbasis kinerja), dan memberikan bimbingan dan peningkatan kapasitas untuk kabupaten/kota, sekolah, dan guru yang berkinerja rendah.Pengembangan sistem manajemen data pendidikan yang terintegrasi akan membantu pembentukan indeks kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Penerbitan indeks kualitas pendidikan untuk setiap kabupaten/kota dapat membantu meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas lokal dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Penggunaan mekanisme transfer antar pemerintah dengan berbasis hasil dapat diperkenalkan dengan menggunakan indeks kualitas pendidikan. Dengan inisiatif *big data*, Pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pendidikan, dan memperkuat mekanisme akuntabilitas, dan juga dengan demikian mampu mempercepat pemulihan pasca-COVID-19 dan membangun ketahanan di masa mendatang.

DAFTAR **PUSTAKA**

Al-Samarrai, S. 2013. **"Local Governance and Education Performance: A Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts."** World Bank, Jakarta, Indonesia.

Al-Samarrai, Samer; Fasih, Tazeen; Hasan, Amer; Syukriyah, Daim. 2014. **Assessing the role of the school operational grant program (BOS) in improving education outcomes in Indonesia** (English). Jakarta, Indonesia: World Bank Group.

Bruns, B., D. Filmer, and H. A. Patrinos. 2011. **Making Schools Work: New Evidence on Accountability Reforms.** Washington, DC: World Bank.

Chang, M. C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A. 2014. **Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making.** World Bank. Washington, DC.

de Ree, J., K. Muralidharan, M. Pradhan, and H. Rogers. 2017. **"Double for Nothing? Experimental Evidence on an Unconditional Teacher Salary Increase in Indonesia."** Policy Research Working Paper 8264, World Bank, Washington, DC.

Gaduh, A., Pradhan, M., Priebe, J., and Susanti, D. 2020. **"Scores, Camera, Action? Incentivizing Teachers in Remote Areas."** RISE Working Paper Series. 20/035. https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-WP_2020/035.
Hanushek. 2003. The failure of input-based policies. The Economic Journal. 113 (February), F64-F98

INOVASI. 2017. **A case study of a teachers' cluster working group in Moyo Hulu, Sumbawa.** INOVASI.

Kesuma, R., Utz, A., Bodrogini, P., Purwana, R. 2018. **Efficient Deployment of Teachers: A Policy Note.** World Bank.

Lewis, B. and Smoke, P. 2017. **Intergovernmental fiscal transfers and local incentives and responses: The case of Indonesia.** Fiscal Studies, 38(1), pp.111-139.

Lewis, B. Forthcoming. **Indonesia fiscal transfer chapter that has been prepared for the global study on decentralized education financing systems.**

Rahmawati and Asriyanti. 2016. **Integrity Index of National Exam: An Effort to Gain Precise Information on Achievement of Curriculum Standards,** Paper presented at IAEA, 2016.

Rosser, A., Fahmi. M. 2016. **The Political Economy of Teacher Management in Decentralized Indonesia. Working Paper in Economics and Development Studies.** University of Padjajaran.

Sari, V. A. and Tiwari, S. Forthcoming. **The Geography of Human Capital: Insights from the Sub-national Human Capital Index in Indonesia.** Jakarta: The World Bank

World Bank. 2014. **Sudan – State-level Public Expenditure Review; Meeting the Challenges of Poverty Reduction and Basic Service Delivery. Synthesis Report – Summary for Policy Makers.** World Bank. Washington DC.

World Bank. 2013. **Spending more or spending better: Improving education financing in Indonesia.** World Bank. Washington DC.

World Bank. 2014. **Albania Public Finance Review – Part II: Improving the Efficiency and Quality of Spending.** World Bank. Washington, DC.

World Bank. 2013. **Tajikistan Policy Notes on Public Expenditure – Policy Note no.3: Review of Public Expenditure on Education.** World Bank. Washington, DC.

World Bank. 2016. **Mauritania PER – Surfing the Wave: Public Spending during Commodity Super Cycle and Beyond.** World Bank. Washington, DC.

World Bank. 2018a. **Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific.** Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1261-3.

World Bank. 2018b. **Indonesia Economic Quarterly: Learning More, Growing Faster. June.** Jakarta: World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29921.

World Bank. 2018c. **School-based management policies in Indonesia and their implementation at the school level.** Washington, DC: World Bank.

World Bank. 2020a. **Indonesia Public Expenditure Review – Spending for Better Results.** World Bank. Washington, DC.

World Bank. 2020b. **The Promise of Education in Indonesia. World Bank.** Washington, DC.

World Bank. **Forthcoming_a. Leading School Digitally: Evaluation of the e-RKAS in Indonesia.** World Bank.

World Bank. **Forthcoming_b. An Independent Verification of Education Sector Data in Indonesia.** World Bank.

World Bank. **Forthcoming_c. Policy Brief on Subnational Budget Classification and Chart of Accounts.** Preliminary assessment on Permendagri No. 90/2019 and inputs for RPP BAS.

Yarrow, Noah; Afkar, Rythia; Masood, Eema; Gauthier, Bernard. 2020. **Measuring the Quality of MoRA's Education Services,** World Bank, Jakarta.

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

Australian Government